

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan semakin kuat dan luasnya globalisasi. Bisnis yang kuat dan berpengalaman akan mendapat keuntungan, tetapi di sisi lain untuk bisnis yang baru tumbuh akan sulit dalam bersaing sehingga akan mengalami krisis keuangan. Situasi tersebut menuntut perusahaan memperkuat fundamentalnya agar dapat mengantisipasi perkembangan global yang terjadi. Dalam hal ini perusahaan yang tidak mampu memperbaiki kinerjanya lambat laun akan mengalami kesulitan keuangan yang pada akhirnya bisa berujung pada kebangkrutan.

Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau *insolvensi*, kebangkrutan sebagai kegagalan yang diartikan sebagai kegagalan perusahaan (*financial failure*) yaitu bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban, dan kegagalan ekonomi (*economic failure*) yang terjadi pada perusahaan yang mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja.

Kelangsungan hidup akan kegagalan perusahaan (*financial Distress*) adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Perusahaan yang dinilai secara keuangan baik, bisa saja setahun kemudian dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.

Penyebab langsung kegagalan bisnis dapat dikomplikasikan dalam sebuah daftar panjang yang mencakup penurunan penjualan, teknologi yang usang, ekspansi perusahaan yang berlebihan, ketidakcukupan modal kerja bersih, pinjaman jangka pendek atau jangka panjang yang berlebih, suku bunga yang tinggi, kerugian kredit yang berlebihan, produksi yang tidak efisien, pembatasan pinjaman ketat, penipuan, kontrol kualitas yang buruk, perubahan peraturan pemerintah, bencana alam, kompetisi yang berlebihan, dan iklan tidak terbatas (Racmawati, 2011).

Menurut Atmajaya (2008) dalam Rahmy (2015:2) *financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Menurut Wruck (1990) dalam Hidayat dan Meiranto (2014:1) *financial distress* merupakan suatu keadaan dimana arus kas operasi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya seperti hutang dagang ataupun biaya bunga. Tanda-tanda perusahaan mengalami *financial distress* dapat diperoleh dari berbagai macam indikator kinerja keuangan. Menurut Aksoy dan Ugurlu (2006) dalam Hidayat dan Meiranto (2014:2), rasio keuangan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya terjadi. Beberapa penelitian yang menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi kondisi *financial distress* suatu perusahaan antara lain adalah

Hidayat dan Meiranto (2014), Rahmy (2015), Triwahyuningtias dan Muharram (2012), dan Noviandri (2014) yang memiliki hasil tidak konsisten terhadap kondisi *financial distress* perusahaan.

Disamping analisis rasio keuangan, informasi lain yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya *financial distress*, yaitu mekanisme *good corporate governance*.

Oleh karena itu tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) menjadi sangat penting di Indonesia setelah adanya krisis *financial* di negara Asia termasuk Indonesia yaitu pada tahun 1997. Kelemahan dalam *corporate governance* merupakan salah satu sebab utama kerawanan ekonomi yang mengakibatkan memburuknya perekonomian di negara-negara Asia tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001 dalam Al-Khatib, 2012). Menurut Ho dan Wong (2001), krisis *financial* di Asia bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya kepercayaan dari investor namun juga disebabkan oleh kemunduran *corporate governance* suatu perusahaan.

Untuk menghindari perusahaan mengalami *financial distress* maka salah satu langkah yang bisa digunakan perusahaan adalah melalui penerapan *corporate governance* yang diyakini dapat membuat perusahaan menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab atas kegiatan bisnisnya (Wardhani, 2006 dalam Gusti dan Ketut, 2015).

Simon dan Kar (2001) berpendapat bahwa *corporate governance* dipandang efektif untuk menggambarkan hak dan tanggung jawab dari setiap kelompok dalam perusahaan. Serta, mekanisme *corporate governance*

diperkenalkan untuk mengontrol masalah keagenan dan memastikan bahwa manajer bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, *corporate governance* diyakini dapat membantu mengelola perusahaan dengan baik sehingga tercipta mekanisme pengendalian secara internal maupun eksternal bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak hanya mendapat keuntungan saja namun juga memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap operasional perusahaan tersebut.

Dewasa ini penerapan prinsip *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia semakin diperhatikan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerapan *corporate governance* terutama melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pentingnya dewan direksi dan dewan komisaris dalam struktur *corporate governance* memberikan intuisi bahwa dewan direksi dan dewan komisaris memiliki kekuatan untuk menentukan keberhasilan perusahaan. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan yang dihadapinya. Keberadaan dan karakteristik dewan direksi dan dewan komisaris sebagai salah satu motor penggerak *corporate governance* akan menentukan tingkat kesehatan keuangan perusahaan.

Dewan direksi, merupakan organ perusahaan yang menentukan kebijakan dan strategi yang diambil oleh perusahaan. Dewan direksi pada suatu perusahaan akan menentukan kebijakan atau strategi yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Chiang dan Lin (dalam Hutagalung, 2012) menyebutkan bahwa kepemilikan serta komposisi dewan ialah komposisi terpenting pada tata kelola perusahaan. Jumlah dewan direksi yang semakin besar akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (Emiraldi, 2007). Jensen (dalam Agusti, 2013) melalui penelitiannya berpendapat bahwa untuk perusahaan yang memiliki jumlah dewan direksi yang lebih banyak merupakan perusahaan yang termasuk dalam kategori sehat dan terhindar dari *financial distress* dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sedikit jumlah dewan direksi

Wayan (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan dan positif ukuran dewan direksi dengan kesulitan keuangan. Artinya, semakin besar jumlah dewan direksi maka semakin kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan.

Ariefatun (2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan tidak signifikan ukuran dewan direksi dengan kesulitan keuangan. Artinya, ada tidaknya peningkatan pada ukuran dewan direksi tidak akan berpengaruh terhadap *financial distress*.

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan berperan lebih ditekankan kepada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris inilah diharapkan dapat meminimalkan permasalahan *agency* yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham.

Perusahaan yang memiliki jumlah *independent commissioner* yang semakin banyak akan membuat suatu perusahaan memiliki sistem pengelolaan

yang semakin baik di dalam perusahaan tersebut. Emiraldi (2007) menyebutkan bahwa jumlah yang semakin banyak dari komisaris independen di suatu perusahaan mampu meminimalisir terjadinya *financial distress* dikarenakan semakin banyak pihak independen yang mengawasi manajemen perusahaan. Daily dan Dalton (dalam Gusti dan Ketut, 2015) menyatakan adanya pengaruh independensi dewan komisaris dengan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Dewan komisaris dapat mengawasi kinerja dewan direksi, sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2006 dalam Gusti, 2015).

Krisnayanti (2013) yang menyatakan adanya hubungan signifikan dan positif ukuran dewan komisaris dalam menentukan kemungkinan perusahaan mengalami tekanan keuangan.

Berangkat dari uraian diatas, maka peneliti ingin mengangkat penelitian yang berjudul: Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Direksi terhadap *Financial Distress* Pada Perusahaan Publik (Non-Keuangan) yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011 Sampai Dengan 2014.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang riset yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap terjadinya *financial distress* pada perusahaan publik (non-keuangan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014?
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap terjadinya *financial distress* pada perusahaan publik (non-keuangan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan publik (non-keuangan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan publik (non-keuangan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Bentuk kegunaan penelitian tersebut berupa:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi dan manajemen yang diharapkan dapat memberikan tambahan literatur, kontribusi pemikiran dan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris terhadap *financial distress* pada perusahaan finansial di Indonesia

2. Manfaat Praktis

a. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress*, khususnya ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan secara umum nya dan dapat menjadi acuan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mampu menghindari perusahaan dari kondisi *financial distress* serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang dapat mengontrol tindakan manajemen.

c. Bagi para investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai *financial distress* sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan.